

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia dalam perkembangannya mulai memasuki zaman modernisasi, bidang ekonomi salah satu halnya yang sudah mulai berubah seiring dengan waktu. Ekonomi memiliki peranan penting untuk menopang suatu negara yang ada di dalamnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka suatu negara dapat dikatakan mampu untuk berdiri dan berkembang sendiri hingga mendapatkan gelar sebagai negara maju. Masing-masing perusahaan baik swasta dan milik pemerintah, keduanya adalah salah satu tiang dalam mempertahankan stabilitas keuangan negara. Khususnya di negara Indonesia yang sudah dapat dikatakan sebagai negara berkembang mandiri. Dengan banyaknya segala sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak heran banyaknya keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat pribumi. Harapan pemerintah pun akan hal ini berorientasi pada satu tujuan yaitu mengedepankan serapan ekonomi dalam aspek-aspek inovatif dan juga penelitian. (Kuswara : 2018).

Lembaga yang menaungi penelitian dalam Indonesia terdiri menjadi dua bagian, yaitu penelitian berdasarkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Indonesia (Riset DIKTI), dan yang kedua adalah lembaga

individu yang langsung di naungi oleh presiden Republik Indonesia yaitu LPNK singkatan dari Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Untuk LPNK sendiri memiliki peranan yang sama dengan kementrian lain yang ada di Indonesia hanya saja lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, maupun peranan yang berbeda dalam keberlangsungan badan usaha mereka. Orientasi dari LPNK itu sendiri lebih menitikberatkan pada penelitian yang bersifat objektif dan mengharuskan penelitian di lapangan langsung. Sehingga apabila LPNK berada di bawah kementrian lini tanggung jawab akan hasil penelitian kepada pimpinan negara sangat terhambat. (www.bpkp.go.id)

Salah satu contoh langsung yang dapat sering dilihat dari LPNK adalah bidang penelitian, dimana bidang ini bertujuan untuk memberikan suatu hasil observasi yang nantinya akan memberikan dampak positif pada keberlangsungan masyarakat Indonesia di masa yang akan mendatang. Sebagai tempat penelitian, penulis mengambil suatu tempat bernama PSTNT BATAN Bandung yaitu Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan. Lebih dikenal sebagai Badan Tenaga Nukli Nasional (BATAN) oleh beberapa masyarakat luas. Tujuan dari BATAN Bandung itu sendiri adalah memberikan suatu dorongan berupa rangsangan pengetahuan akan nuklir, yang masih dianggap sebagai persepsi sebelah mata oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan keunggulan dari Nuklir membuat suatu tugas besar bagi BATAN untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat akan kegunaan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Seperti

dalam teknik pangan pertanian, pengobatan medis nuklir, dan juga pendidikan berbasis ilmu terapan nuklir. (www.batan.go.id)

Suatu badan penelitian terutama yang dinaungi oleh pemerintah masih dapat dikatakan memiliki suatu hak dan kewajiban yang diterima oleh badan itu sendiri. Khususnya dalam aspek keuangan, namun terbenturnya antara pihak peneliti akan anggaran pemerintah berupa hibah penelitian membuat para peneliti merasa tingkat anggaran pemerintah masih terlalu minim dibanding negara lain. Berdasarkan Pikiran Rakyat Depok tahun terbit 2016 menjelaskan “Untuk dana penelitian Indonesia masih termasuk minim hanya berkisar Rp 16 Miliar sampai Rp 17 Miliar atau hanya 0,2 persen per kapita Produk Domestik Bruto (PDB)...” jumlah akan kesepakatan pemerintah pun membagi lagi anggaran untuk belanja pegawai yang berada dalam LPNK, seperti BATAN yang diberikan sekitar 1,6 persen untuk belanja pegawai dan peneliti dalam satu tahun anggaran (Koran Pikiran Rakyat Depok : 2016).

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 23 mengenai anggaran dipaparkan dalam dua bagian yang saling terkait, seperti pada paparan ayat pertama “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam petikan yang terdapat pada pasal 23 ini menjelaskan bahwa suatu Anggaran Belanja Negara haruslah berguna untuk kepentingan masyarakat khususnya Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin besar. Kemudian dilanjutkan

dengan petikan ayat ke dua yaitu “(2) Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Pada ayat kedua ini menjelaskan dalam suatu penyusunan anggaran, pemerintah diharapkan bisa menjadi transparansi kepada segala lapisan masyarakat yang diwakilkan oleh DPR dan juga DPD ketika akan diadakan rumusan anggaran. Hal ini terjadi untuk menghindari kecurigaan masyarakat pada pemerintah.

Suatu anggaran yang telah dibuat oleh pemerintah tentunya tidak akan jauh dari pengawasan, inilah salah satu hal yang menjadikan pemerintah tidak secara sembarangan untuk langsung memberikan dana kepada beberapa satker yang ada di Indonesia. Salah satu cara yang pemerintah lakukan terutama Dirketur Jenderal Anggaran bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dibawah naungan Menteri Keuangan membuat kebijakan khusus, yaitu masing-masing satker pada akhir tahun anggaran akan diminta laporan pertanggungjawaban untuk anggaran yang telah diberikan pada mereka berupa Laporan Realisasi Anggaran. Suatu laporan tentunya adalah bentuk nyata yang dapat dilakukan untuk mempertanggungjawabkan atas dana-dana dalam belanja negara mana yang telah dipakai selama masa satu tahun anggaran tersebut. (djpbn.kemenkeu.go.id)

Pada perusahaan jasa dan manufaktur biasa disebut Laporan Laba Rugi untuk menentukan berapa besara Laba perusahaan maupun kerugian perusahaan dalam periode akuntansi, namun pada pemerintahan menyebutnya

dengan Laporan Realisasi Anggaran yang wajib dibuat oleh satker dan telah disepakati sebelum periode anggaran, adapun isi dari Laporan Realisasi Anggaran mengandung beberapa bagian antara lain : Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; Belanja Negara dan Hibah. Untuk Pendapatan Negara yang dimaksud adalah suatu iuran, atau masukan dana yang diterima negara melalui bendahara penerimaan selain daripada pajak yang sebagai pungutan wajib pada suatu negara. PNBP itu sendiri merupakan penghasilan negara yang diterima dari beberapa hal kegiatan yang dilakukan, seperti contoh PSTNT BATAN Bandung yang memungut hasil penelitian kimia, dan hasil jasa penelitian tersebut akan masuk ke dalam rekeningn PNBP. (PP No. 05 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP).

Selain daripada PNBP pada satker pemerintahan selalu ada yang namanya Belanja Negara, yaitu segala hal yang berhubungan dengan pencairan dana atau pengeluaran dana pemerintah untuk menjalankan operasional pada satker itu sendiri. Belanja Negara terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Kemudian terakhir adalah Hibah, pada dasarnya hibah yang dimiliki pemerintah tidak jauh berbeda dengan hibah pada umumnya. Yaitu pemberian dari suatu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan satker untuk memberikan dukungan dan juga kontribusi mereka dalam menjalankan operasional satker tersebut. Hibah dapat terdiri dari dua macam jenisnya, yang pertama adalah Hibah Belanja Barang dan Hibah Belanja Modal. Keunikan dari Laporan Realisasi Anggaran ini sendiri adalah sebagai penentu

berapa besaran penerimaan satker untuk negara dan juga berapa besar belanja negara yang terpakai dari anggaran negara. (PP No. 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

Perencanaan anggaran yang dibuat pun setidaknya harus memenuhi syarat sebagai salah satu bidang penting dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan pada masing-masing satker. Namun terkadang perencanaan selalu menimbulkan perbedaan ketika memasuki tahun berjalan berikutnya, baik dalam bentuk apapun seperti ada beberapa rencana kegiatan yang lupa untuk dilakukan estimasi dan menimbulkan satker tersebut akhirnya membuat perubahan rencana. Hal ini lah yang membuat terkadang dalam kurun waktu satu tahun anggaran satker sering kali mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan operasional mereka sampai tahun berakhir. (PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional)

Dengan menggunakan sistem aplikasi pada komputer pun membuat seorang analis keuangan merasa terbantu walau pada prosesnya analis tersebut terkadang lupa ataupun kurang memahami sistem yang digunakan padanya, adapun aplikasi terkait adalah SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual). Aplikasi tersebut ada banyak pilihan dan juga menu dalam membuat laporan keuangan yang membuat *user* merasa tidak cukup waktu untuk belajar dan mengoptimalkan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Kesalahan sistem yang membuat beberapa pengguna bahkan harus saling meyakinkan diri mereka ketika sedang dalam operasional berlangsung, hal ini

pun yang membuat analisis keuangan pada akhirnya harus melakukan validasi ulang karena adanya kesalahpahaman beberapa pihak terkait keuangan pada dirinya dalam menyusun laporan keuangan. Masalah lain pada PSTNT BATAN Bandung selain dalam bagian internal adalah pihak eksternal yaitu pihak pemerintah pusat selaku pemilik kebijakan khusus, penentuan kebijakan pemerintah membuat beberapa instansi merasa tidak adanya kejelasan dari banyaknya perubahan dan juga salah sasaran kebijakan pemerintah dalam penentuan anggaran. (Kuswara : 2018).

Anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berfungsi sebagai; pertama fungsi perencanaan dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan sebagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka seluruh komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Adisasmita (2011:33)

Berdasarkan data Nota keuangan kemekeu.go.id untuk APBN dan RAPBN pada tahun 2019 alokasi anggaran Program Pengelolaan Belanja

Lainnya dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 154.900,2 Miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya antara lain : (1)antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (2) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (4) penyediaan dana cadangan belanja pegawai; (5) penyediaan dana cadangan bencana alam; (6) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (7) mendukung keanggotaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB; dan (8) Penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak. (Bab 4 : Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2020-2022 kemenkeu.go.id)

Tabel 1.1
Belanja Kementerian/Lembaga
Menurut Sumber Dana, Tahun 2018-2019
(miliar rupiah)

No.	Sumber Dana	Outlook 2018	RAPBN 2019
1.	Rupiah Murni	717.175,8	714.147,8
2.	Pagu Penggunaan PNBK	19.735,5	26.543,3
3.	Pagu Penggunaan BLU	37.608,1	45.505,8

4.	Pinjaman Luar Negeri	19.123,5	23.304,7
5.	Hibah Luar Negeri	637,0	391,2
6.	Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri	5.128,9	1.956,4
7.	SBSN PBS	14.070,0	28.434,7
Total		813.476,7	840.284,0

Sumber : Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019

Berdasarkan jurnal penelitian Novelya Suoth, menjelaskan bahwa Hasil penelitian berdasarkan Kinerja Keuangan pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah. (Novelya Suoth, 2016).

Selaras dengan Jurnal Penelitian dari Kiky Muryanti pada tahun 2017 memberikan hasil penenelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama

tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran. (Kiky Muryanti : 2017)

Dalam Penelitian Naima Khoirul Arifa pada tahun 2017, menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis varian pendapatan dapat dikategorikan baik, analisis pertumbuhan pendapatan dinilai positif, derajat desentralisasi dinilai kurang baik, rasio efektivitas PAD menunjukkan sangat efektif. Sedangkan analisis varian belanja dapat dikategorikan baik, analisis keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai sangat serasi, belanja modal dinilai tidak serasi, rasio efisiensi belanja dinilai cukup efisien. Dan kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan Daerah (Naima Khoirul Arifa : 2017).

Sehingga dalam suatu Laporan Realisasi Anggaran yang menghitung rasio efektivitas dan efisiensinya dapat disimpulkan masih sangat jauh atau sangat terlihat kontras antara efektivitas yang tinggi dari hasil penyerapan anggaran yang besar atau sesuai dengan anggaran instansi yang diminta. Namun efisiensi pada instansi pemerintahan sangat jauh dari kata efisien, dikarenakan tingkat penggunaan belanja Negara langsung yang lebih besar

bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada instansi tersebut. (Vera Sri : 2014).

Berdasarkan dengan uraian diatas mengenai suatu anggaran dan juga hal-hal yang bersangkutan dengan adanya penggunaan anggaran. Dimulai dari usulan yang melatarbelakangi suatu keputusan anggaran dan pencairan dana dalam Belanja Negara, suatu bagian yang membuat penulis memiliki keinginan untuk meneliti hal tersebut. Maka penulis pun akan mengambil judul penelitian “Pengaruh Efisiensi Belanja Negara Terhadap Laporan Realisasi Anggaran periode 2014-2018 di PSTNT-BATAN Bandung.”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai gambaran umum Anggaran Belanja Pegawai atas Laporan Realisasi Anggaran, maka penulis menentukan beberapa garis besar yang lebih spesifik untuk penelitian ini yaitu antara lain :

1. Banyaknya Laporan Realisasi Anggaran yang belum dikatakan wajar pada instansi pemerintah. Yaitu masih terdapat perbedaan nilai dimana Efektifitas Instansi selalu lebih baik daripada Efisiensi yang selalu kurang.
2. Tingkat Efisiensi pada instansi pemerintahan masih dikatakan rendah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah

terutama LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) seperti PSTNT BATAN Bandung.

3. Kurangnya evaluasi yang matang dalam penyajian laporan keuangan instansi yang wajar, sehingga nilai suatu laporan semacam efisiensi masih dianggap rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Penulis memiliki rumusan masalah yang ditemui dalam melakukan penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Efisiensi Belanja Negara (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Hibah) periode 2014-2018 di PSTNT BATAN Bandung.
2. Bagaimana Laporan Realisasi Anggaran periode 2014 – 2018 di PSTNT BATAN Bandung
3. Seberapa besar pengaruh Efisiensi Belanja Negara terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada periode 2014 – 2018 di PSTNT BATAN Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dibuat penulis memiliki beberapa aspek berdasarkan rumusan masalah diatas antara lain :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Efisiensi Belanja Negara (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Hibah) periode 2014 – 2018 di PSTNT BATAN Bandung.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui Laporan Realisasi Anggaran periode 2014 – 2018 di PSTNT BATAN Bandung
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Efisiensi Belanja Negara terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada periode 2014 – 2018 di PSTNT BATAN Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan berguna bagi beberapa pihak. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu acuan baru dalam pengembangan pengetahuan akuntansi berupa Akuntansi Pemerintahan yang bertemakan Efisiensi Belanja Negara Terhadap Laporan Realisasi Anggaran pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk masing-masing satker terkait.

1. Bagaimana efisiensi Belanja Negara Terhadap Laporan Realisasi Anggaran periode 2014 – 2018 di PSTNT BATAN Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh efisiensi Belanja Negara terhadap Laporan Realisasi Anggaran periode 2014 – 2018 di PSTNT BATAN Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan dalam penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi penulis, diharapkan mampu untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan terhadap ilmu akuntansi yang telah ditempuh selama mengikuti perkuliahan strata satu di Universitas Winaya Mukti, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik dan analisis kinerja laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
2. Bagi pihak instansi, dapat menjadikan sebagai salah satu parameter maupun bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan laporan keuangan yang wajar terutama dalam penyajian laporan keuangan instansi pemerintahan.
3. Bagi khalayak umum baik peneliti selanjutnya maupun pembaca, dapat menjadi suatu acuan ataupun pengembangan penelitian yang lebih baik dalam bidang analisis laporan keuangan pemerintah.